

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan temuan yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan, dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan kebijakan SPMB melalui jalur domisili pada SMP Negeri di Jakarta Utara pada dasarnya telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Namun, dalam proses implementasinya masih muncul sejumlah hambatan yang dapat memengaruhi keberhasilan kebijakan secara keseluruhan. Berbagai persoalan tersebut menunjukkan bahwa pencapaian tujuan kebijakan belum sepenuhnya optimal.

Kendala-kendala ini tampak dari beberapa indikator yang menjadi acuan evaluasi, seperti kesiapan pelaksana, pemahaman masyarakat terhadap kebijakan, serta kondisi lingkungan internal dan eksternal yang turut memengaruhi jalannya implementasi. Dengan demikian, meskipun kebijakan telah diterapkan, efektivitasnya masih memerlukan peningkatan agar mampu mencapai sasaran yang diharapkan.

4.1.1 Implementasi Kebijakan SPMB Jalur Domisili SMP Negeri di Jakarta Utara

- a. Urgensi & Skema Pemerintah, Dilihat dari sisi lingkungan internal dan eksternal kebijakan, kondisi keduanya tidak sepenuhnya sama. Pada lingkungan internal, pelaksanaan kebijakan sudah cukup baik karena ada kerja sama antara pihak yang menyusun kebijakan dan

para pelaksana di tingkat provinsi, kota, hingga sekolah. Namun, dari sisi lingkungan eksternal, dukungan masyarakat masih kurang maksimal. Sebagian warga masih merasa dibatasi dalam memilih sekolah karena adanya aturan domisili yang menentukan wilayah pendaftaran.

- b. Respon Target Sasaran, Dalam konteks kemampuan masyarakat sebagai kelompok sasaran kebijakan, pelaksanaan program ini belum sepenuhnya mencapai ketepatan target. Upaya untuk mengurangi persepsi mengenai sekolah favorit dan nonfavorit belum berhasil sepenuhnya, karena sebagian masyarakat masih menentukan pilihan sekolah berdasarkan prestasi akademik, citra sekolah, serta ketersediaan fasilitas yang dianggap unggul.

4.1.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan SPMB Jalur Domisili SMP Negeri di Jakarta Utara

a. Faktor Pendukung implementasi kebijakan, terdiri dari:

- 1. Standar dan Sasaran, keberadaan standar dan sasaran menjadi salah satu faktor yang memperkuat implementasi program. Dukungan tersebut tampak dari adanya rumusan tujuan serta indikator pencapaian yang telah ditetapkan secara jelas melalui beragam regulasi, mulai dari Undang-Undang, aturan pelaksana, hingga Keputusan Gubernur DKI Jakarta. Selain itu, pedoman teknis yang disusun sebagai acuan operasional turut memberikan arahan yang

lebih rinci mengenai bagaimana proses SPMB harus dijalankan. Kejelasan ini memungkinkan para pelaksana memahami target kebijakan serta langkah yang perlu dilakukan, sehingga pelaksanaannya dapat berlangsung secara lebih sistematis dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Sumber Daya dalam suatu kebijakan dapat dipahami melalui ketersediaan sumber daya manusia serta fasilitas yang mendukung pelaksanaannya. Pada pelaksanaan kebijakan ini, kondisi kedua aspek tersebut dapat dikatakan cukup menunjang. Dari sisi sumber daya manusia, para pelaksana kebijakan telah memiliki kemampuan, pengetahuan, serta pemahaman yang diperlukan untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang telah ditetapkan. Kemampuan tersebut berperan penting dalam memastikan bahwa setiap tahapan implementasi dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Di samping itu, sarana dan prasarana yang digunakan selama proses pelaksanaan, berada dalam kondisi yang memadai sehingga dapat memenuhi kebutuhan teknis dan operasional yang diperlukan. Ketersediaan fasilitas ini memberikan dukungan penting bagi kelancaran proses pelaksanaan di lapangan.

Aspek pendanaan juga menjadi komponen yang memberikan kontribusi signifikan. Alokasi anggaran yang disediakan memungkinkan berbagai kegiatan operasional terkait implementasi

kebijakan dapat berjalan dengan baik tanpa mengalami hambatan berarti. Keseluruhan ketersediaan sumber daya baik yang bersifat manusia, fisik, maupun finansial menunjukkan bahwa dukungan terhadap pelaksanaan kebijakan sudah cukup kuat sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan membantu tercapainya tujuan kebijakan secara lebih optimal.

3. Karakteristik Agen Pelaksana kebijakan dapat ditinjau dari bagaimana struktur organisasi dibentuk serta bagaimana koordinasi di antara pihak-pihak terkait dijalankan. Pada kebijakan ini, kedua aspek tersebut berperan penting dalam mendukung keberhasilan implementasinya. Hal tersebut tampak dari adanya pembentukan panitia SPMB di setiap level mulai dari provinsi, kota, hingga satuan pendidikan yang dilengkapi dengan pembagian tugas yang telah disusun sesuai kebutuhan pelaksanaan. Pengaturan struktur dan penugasan yang jelas tersebut memudahkan proses kerja di lapangan, sehingga pelaksanaan kebijakan dapat berjalan lebih terarah dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
4. Disposisi para pelaksana dapat dilihat dari cara mereka memandang kebijakan serta bagaimana mereka menjalankan tugas di lapangan. Pada kebijakan ini, disposisi implementor menjadi salah satu faktor yang mendukung keberhasilan pelaksanaannya. Para pelaksana menunjukkan komitmen yang kuat, terlihat dari kepatuhan mereka

dalam mengikuti ketentuan dan menjalankan tugas sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

b. Faktor Penghambat implementasi kebijakan, terdiri dari:

1. Komunikasi Antar Organisasi dalam kebijakan ini juga mencakup bagaimana informasi disampaikan kepada masyarakat. Meskipun kegiatan sosialisasi sudah dilakukan, pelaksanaannya belum dapat dikatakan sepenuhnya efektif. Di tingkat sekolah, sosialisasi lebih banyak berfokus pada penjelasan mengenai cakupan wilayah domisili dan dilakukan dengan mengundang ketua RT dan RW yang berada dalam area prioritas. Namun, penjelasan mengenai aspek teknis SPMB belum disampaikan secara mendalam. Akibatnya, masih ada warga yang belum memahami prosedur pendaftaran dengan baik dan mengalami kesulitan saat proses SPMB berlangsung, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan dalam mengakses informasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyampaian informasi masih perlu ditingkatkan agar masyarakat bisa mengikuti alur SPMB dengan lebih mudah.
2. Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik di tengah masyarakat masih belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan kebijakan ini. Hal tersebut terlihat dari berbagai tanggapan serta sikap masyarakat terhadap aturan yang diterapkan. Sebagian warga menilai bahwa kebijakan tersebut belum memberikan kesempatan yang setara,

terutama bagi mereka yang tinggal jauh dari sekolah yang dituju atau berusia lebih muda, sehingga peluang diterimanya menjadi lebih kecil dalam jalur domisili.

Keadaan ini membuat sebagian orang mencari jalan lain, seperti mengubah alamat pada Kartu Keluarga agar sesuai dengan wilayah sekolah yang diinginkan. Praktik tersebut menunjukkan bahwa masih ada masyarakat yang memberikan respon kurang positif terhadap kebijakan ini, dan hal ini dapat menimbulkan hambatan dalam proses penerapannya di lapangan.

4.2 Saran

4.2.1 Implementasi Kebijakan SPMB Jalur Domisili SMP Negeri di Jakarta Utara

1. Respon Target Sasaran masih banyak bertahannya persepsi masyarakat mengenai adanya perbedaan antara sekolah yang dipandang unggul dan yang dianggap kurang unggul menunjukkan bahwa stigma tersebut belum sepenuhnya teratasi. Untuk itu, peneliti mengusulkan agar pemerintah daerah bersama pihak sekolah terus berupaya meningkatkan mutu pendidikan secara komprehensif. Langkah ini dapat ditempuh melalui pengembangan sarana dan prasarana, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan tata kelola sekolah. Perbaikan yang dilakukan secara konsisten diharapkan mampu mengurangi kesenjangan persepsi masyarakat terhadap kualitas sekolah, sehingga isu terkait pelabelan sekolah favorit dapat berangsur hilang dan tidak lagi menjadi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan.

2. Kriteria Lembaga terkait dengan kondisi lingkungan eksternal kebijakan, masih ada sebagian masyarakat yang merasa pilihan mereka terbatas dalam menentukan sekolah karena adanya aturan domisili. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua warga memahami mekanisme SPMB secara keseluruhan. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan sosialisasi yang lebih intens dan mudah dipahami agar masyarakat mengetahui bahwa SPMB tidak hanya mengandalkan jalur domisili saja. Melalui sosialisasi yang lebih baik, masyarakat dapat memahami bahwa ada jalur lain yang bisa digunakan sesuai ketentuan, seperti jalur prestasi, afirmasi, atau jalur khusus lainnya. Informasi ini penting karena proses pada jalur domisili dilakukan setelah pendaftaran pada jalur-jalur lain selesai. Dengan meningkatnya pemahaman tersebut, diharapkan masyarakat tidak lagi merasa dibatasi dan pelaksanaan SPMB dapat berjalan lebih lancar.

4.2.2 Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan SPMB Jalur Domisili SMP Negeri di Jakarta Utara

1. Komunikasi antar Organisasi, Selama ini sosialisasi kepada masyarakat masih banyak menekankan pada aspek domisili. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk meningkatkan efektivitas sosialisasi yang dilakukan panitia SPMB di tingkat sekolah, misalnya dengan melibatkan ketua RT dan RW di sekitar sekolah agar penyampaian informasi dapat dilakukan secara langsung. Materi sosialisasi pun sebaiknya menjelaskan ketentuan serta alur pelaksanaan SPMB secara menyeluruh.

Di samping pertemuan langsung, penyebaran informasi juga dapat diperluas melalui berbagai media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, maupun melalui situs resmi Dinas Pendidikan. Dengan cara ini, panitia SPMB sekolah dapat tetap menjadi pihak yang pertama melayani masyarakat, memberikan penjelasan secara langsung, serta membantu

ketika ada masalah atau kendala yang muncul selama proses SPMB berlangsung.

2. Kondisi Ekonomi Sosial dan Politik Sebagian masyarakat masih merasa dirugikan oleh kebijakan ini karena proses seleksinya melihat wilayah domisili dan usia. Karena itu, diperlukan perbaikan standar persyaratan bagi calon peserta didik, baik dalam penentuan zona prioritas maupun aturan usia pada jalur zonasi SPMB. Pihak pembuat kebijakan juga perlu meninjau kembali wilayah RT dan RW yang belum termasuk dalam zona prioritas, sehingga cakupan zonasi bisa diperluas dan warga di area tersebut memiliki peluang lebih besar untuk masuk sekolah negeri.

Masyarakat umumnya memilih sekolah yang dekat dari rumah agar lebih mudah dalam kegiatan sehari-hari. Hal ini secara tidak langsung dapat membantu mengurangi pembagian citra sekolah favorit dan tidak favorit, karena pilihan sekolah lebih ditentukan oleh jarak, bukan oleh label sekolah.